PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPH BADAN TERHADAP PENERIMAAN PPH BADAN
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Periode 2014-2016)

EFFECT OF THE AMOUNT OF CORPORATE TAXPAYERS AND THE DELIVERY OF NOTIFICATION PERIOD LETTER OF CORPORATE INCOME TAX TO THE CORPORATE INCOME TAX RECEIPTS
(Case Study At The Tax Office Pratama Sumedang Period 2014-2016)

Oleh:
Amitawati
21113230
Pembimbing 1: Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc
Pembimbing 2: Dr. Surtikanti, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia
e-mail: Amitawati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh fenomena yang terjadi pada Jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan alasan kesulitan dalam pendaftarannya dan pada jumlah SPT badan yang tidak di sampaikan oleh wajib pajak dengan benar dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya sehingga mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan badan tidak sesuai target.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan Pengaruh Jumlah wajib pajak badan dan penyampaian SPT masa PPh badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinan, uji hipotesis (uji t).

Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang kuat pada Jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan maupun Penyampaian SPT masa PPh badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: *Jumlah wajib pajak badan, Penyampaian SPT masa PPh badan dan Penerimaan PPh Badan*

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak, peranan pajak sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan penerimaan negara semakin besar terbukti dari adanya penerimaan negara yang berasal dari pajak hampir mencapai 80%, maka dari itu penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak (Supramono, 2010:1; Suryadi, 2006:105; Gunadi,2012).

Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak akan terealisasi dan tercapai jika ada kerjasama dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif

dalam membayar pajak (Edi Slamet, 2015; Suryadi, 2006:8).

Keberadaan program intensifikasi pemungutan pajak diharapkan dapat meningkat dengan meningkatkan upaya penegakan hukum serta upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak. Demikian halnya program ekstensifikasi, peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat karena dengan program tersebut jumlah Wajib Pajak dan jenis objek pajak semakin meningkat (Tresno, Indra, Wulan, 2011).

Untuk menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Rahmad Husein, 2013).

Pencapaian target penerimaan pajak penghasilan badan akan optimal dan bertambah, didukung oleh bertambahnya jumlah wajib pajak badan yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru (Timbul H. Simanjuntak, 2012). Tetapi masalah yang dihadapi sebagai salah satu faktor utama rendahnya penerimaan badan ialah karena masih adanya wajib pajak badan yang belum terdaftar dari yang seharusnya, karena masih banyak wajib pajak badan yang tidak patuh dan sukar di lacar dan dikelola potensi pajaknya (Asep, 2017).

Selain jumlah wajib pajak, yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan badan terealisasi, dimana wajib pajak badan yang sudah terdaftar dapat melaporkan dan menyampaikan lewat surat pemberitahuan (SPT) segala kekayaan atau penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dengan benar tanpa ada pemalsuan atau pengurangan dengan sengaja harta kekayaan yang dimiliki, maka penerimaan pajak akan optimal, efektif dan terealisasi. Maka jika banyak SPT yang disampaikan, penerimaan pajak akan optimal (Muhammad Said, 2015:120).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditariklah topik untuk melakukan penelitian yaitu **"Pengaruh Jumlah WP Badan Dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan Terhadap Penerimaan PPh Badan".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar jumlah wajib pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan pajak penghasilan Badan.
2. Seberapa besar penyampaian SPT masa pajak penghasilan Badan yang disampaikan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Sumedang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penyampaian SPT masa pajak penghasilan yang disampaikan wajib pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi KPP
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada kantor pelayanan pajak tentang jumlah wajib pajak Badan dan Penyampaian SPT Masa pajak penghasilan Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.
2) Bagi Wajib Pajak
   Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya wajib pajak untuk lebih memahami perpajakan, terutama mengenai jumlah wajib pajak Badan dan penyampaian SPT masa pajak penghasilan Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) Pengembangan Ilmu
   Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi Perpajakan.
2) Bagi Peneliti Selanjutnya
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh jumlah wajib pajak Badan dan penyampaian SPT masa pajak penghasilan Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Jumlah Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo adalah:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

(2010:20)

2.1.1.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator penagihan pajak dalam penelitian ini menggunakan pemikiran menurut Undang-Undang No. 28. 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2, bahwa penulis menyimpulkan indikator jumlah Wajib Pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada setiap periodenya.

2.1.2 Pengertian Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

2.1.2.1 Pengertian Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

Pengertian Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa menurut Soemarso S.R adalah:

"Menyampaikan pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun atau masa pajak, dengan mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan mendatanganinya. Kriteria benar dan lengkap sangat penting dalam pegisian dan penyampaian SPT".

(2007:52)

2.1.2.2 Indikator Penyampaian SPT masa

Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa indikator Penyampaian SPT masa adalah Jumlah surat yang di gunakan wajib pajak yang menyampaikan dan melaporkan perhitungan kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengertian penerimaan pajak Penghasilan menurut Siti Resmi mengatakan bahwa:

"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak".

(2009:88)

2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Adapun indikator Penerimaan Pajak Penghasilan menurut Supramono dan Theresia mengatakan bahwa:

"Naik turunnya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya". (2010:1)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPh Badan

Menurut Mohammad Zain (2005:30)

"Pada dasarnya tidak ada satupun dari verifikasi atau metode teknis lainnya dapat diperluas sampai mencapai jumlah wajib pajak yang cukup, agar diperoleh efek langsung yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak atau menjamin tercapainya kepatuhan membayar pajak yang sangat tinggi".

Menurut Asri Abdul Jabbar Yoesoef (2013: 183)

"Secara filosofi, pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan income negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan".

2.2.2 Pengaruh Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap Penerimaan PPh Badan

Menurut Jupri Bandang (2015:117)

"Menyampaikan pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun atau masa pajak. Dengan menyampaikan daftar kekayaan di dalam SPT maka akan memperbaiki sehingga penerimaan pajak menjadi optimal, semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak".

Sedangkan menurut Buddy Setianto (2016:15)

"Menyampaikan SPT dan menyampaikannya secara benar maka akan sangat membantu dan menjadi kunci dalam penerimaan pajak".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Penghasilan badan.

H2: Penyampaian Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut oleh Sujoko, Stevanus dan Yuliawati (2009:7) mendefinisikan metode penelitian adalah:

"Metode penelitian adalah strategi dalam melakukan penelitian termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian".

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dimana metode deskriptif merupakan suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, sedangkan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dengan menganalisis melihat pada data-data numerik (angka).

Menurut Uma Sekaran (2003:158) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi".

Menurut Masyhuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.

Berdasarkan sifatnya, menurut Sugiyono (2013:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

> "1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
> 2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar".
>
> Sedangkan Menurut Arikunto (2006:78) metode penelitian kuantitatif sebagai berikut:
> "Menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka-angka) dari mulai pengumpulan data, serta pengambilan dari hasilnya".

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap Penerimaan PPh Badan. Dan unit observasi pengamatan pada penelitian ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian Penerimaan PPh Badan dipengaruhi oleh Penyampaian SPT Masa PPh Badan dan Jumlah Wajib Pajak Badan, maka variabel-variabel yang akan diteliti dapat dibedakan atas dua variabel, yaitu:

1) Variabel *Independent* (Variabel X_1)
   Variabel *independent* atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependent* (terikat). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *independen* pertama dalam penelitian ini adalah "Jumlah Wajib Pajak Badan".
2) Variabel *Independent* (Variabel X_2)
   Yaitu variabel yang ikut mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel lain dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *independent* kedua dalam penelitian ini adalah "Penyampaian SPT Masa PPh Badan".
3) Variabel *Dependent* (Variabel Y)
   Variabel *dependent* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent* (bebas). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *dependent* adalah "Penerimaan PPh Badan".

Untuk memperjelas mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 halaman 12 berikut:

3.3 Sumber Data

Sumber data ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Husein Umar (2008:41) menyatakan bahwa:

> "Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram".

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian mengenai Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap Penerimaan PPh Badan adalah data sekunder.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti. Pengertian populasi menurut Usman dan Akbar (2011:42) bahwa:

"Semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitaif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas".

Menurut Margono (2010: 118) tentang pengertian populasi yaitu:

"Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup & waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia".

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah 36 laporan bulanan mengenai data jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah SPT masa PPh badan yang di sampaikan, jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Sumedang. Keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel.

3.4.2 Penarikan Sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi. Menurut Arikunto (2006: 131) menjelaskan bahwa:

"Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel".

Kemudian menurut Tony (2013:27) mengatakan bahwa:

"Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu".

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh. menurut Arikunto (2006:131) menjelaskan bahwa:

"*Sampling* jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. *Sampling* jenuh ini akan dilakukan apabila populasinya kurang dari 30 orang".

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) mengatakan bahwa:

"Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".

Untuk menunjang hasil penelitian tersebut, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

   Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur, catatan kuliah serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

   Yaitu suatu langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

3.6 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan

oleh pihak lain, maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

Didalam penggunaan analisis linier berganda, diperlukan beberapa pengujian asumsi klasik. Beberapa asumsi klasik regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2011:57) mengatakan bahwa:

"Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas".

Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik sebagai berikut:

a) Uji Normalisasi

Menurut Ghozali (2011:163) mengatakan bahwa:

"Untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali".

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:105) mengatakan bahwa:

"Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139) mengatakan bahwa:

"Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas".

d) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:110) mengatakan bahwa:

"Untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnnya)".

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Albert Kurniawan (2010:52) menjelaskan bahwa:

"Pengaruh antara lebih dari 2 variabel, dimana terdiri dari atau lebih variabel *independent*/bebas dan 1 variabel *dependent*/terikat dan juga digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan (*prediction*)".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh dari jumlah wajib pajak badan dan penyampaian SPT masa PPh badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Data Jumlah Wajib Pajak Badan, Jumlah SPT yang disampaikan dan Realisasi Penerimaan

Pajak Penghasilan Badan dengan unit observasi bagian Pengolahan Data Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang selama 36 bulan pada periode 2014-2016.

4.1.1 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam hal ini untuk melihat hubungan antara Jumlah WP badan dan penyampaian SPT masa dengan penerimaan PPh badan baik secara parsial dan secara simultan.

a. Korelasi antara Jumlah Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh Badan

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara Jumlah WP dengan penerimaan PPh sebesar 0,667. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya semakin banyaknya jumlah wajib pajak terdaftar, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,667 termasuk kedalam kategori hubungan yang yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799.

b. Korelasi antara Penyampaian SPT Masa PPh Badan dengan Penerimaan PPh Badan

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara penyampaian SPT dengan penerimaan PPh sebesar 0,391. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya semakin banyaknya SPT masa disampaikan oleh wajib pajak, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,391 termasuk kedalam kategori hubungan yang rendah, berada dalam kelas interval antara 0,200 – 0,399.

4.1.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penyampaian SPT masa PPh Badan secara simultan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,759 atau 75,9%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan PPh Badan sebesar 57,6%. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 57,6% = 42,2% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Basan dan Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap Penerimaan PPh Badan.

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPh Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa jumlah wajib pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, besar pengaruh jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan 44,1%. Artinya semakin meningkat Jumlah Wajib Pajak Badan maka Penerimaan PPh Badan akan meningkat pula.

Hasil pengujian hipotesis didukung oleh teori yang menyatakan pertumbuhan wajib pajak akan mendatangkan income negara sebanding dengan pertumbuhannya. Dengan kata lain penerimaan pajak dari wajib pajak tersebut akan semakin besar untuk modal pembangunan Indonesia kedepan (Abdul Jabbar Yoesoef, 2013: 183). Tetapi bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang bahwa Jumlah wajib pajak selalu bertambah setiap tahun pada 2014-2016 namun peningkatan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar belum diimbangi dengan penerimaan pajak penghasilan badan yang mencapai target (Asep: 2017).

Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang melalui seksi Ekstensifikasi harus selalu berusaha memberi sosialisasi tentang mengenai pentingnya dalam mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak disaat masyarakat membangun usaha terutama dengan system e-registration. Serta memberikan strategi dan terobosan agar bisa melacak potensi pajak dan dilakukannya penyuluhan pembayaran pajak setiap bulan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar, agar menambah wajib pajak yang membayar pajak, sehingga penerimaan pajak pun meningkat dan bisa mencapai target yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya (Asep: 2017).

Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung/sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Putri Asdora (2014) jumlah wajib pajak badan berpengaruh positif signifikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan yakni semakin banyak wajib pajak badan baru yang terdaftar maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan dan sama halnya penelitian yang di kemukakan oleh Nicola Putra Pratama, Dwiatmanto dan Rosalita Rachma Agusti (2016) yang menyebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap peneriman pajak penghasilan.

4.2.2 Pengaruh Penyampaian SPT Masa PPh Badan terhadap Peneriman PPh Badan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa penyampaian SPT masa PPh badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, besarnya penyampaian SPT masa PPh badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 13,4%. Hubungan penyampaian SPT masa PPh badan dengan penerimaan pajak penghasilan badan bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi searah. Hal tersebut termasuk kedalam kategori hubungan yang rendah. Yang artinya bahwa semakin banyak SPT masa PPh badan yang di sampaikan pada KPP pratama Sumedang maka semakin bertambah pula penerimaan pajak penghasilan badan yang di terima.

Hasil pengujian hipotesis didukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa menyampaikan pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun atau masa pajak. Dengan menyampaikan daftar kekayaan di dalam SPT maka akan memperbaiki sehingga penerimaan pajak menjadi optimal, semakin banyak jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak (Jupri Bandang, 2015:117).

Tetapi bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menunjukan bahwa SPT masa PPh badan bertambah tetapi tidak diikuti dengan penerimaan pajak penghasilan badan yang mencapai target (Redi, 2017).

Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang melalui bagian waskon dan pihak petugas selalu memberikan pelayanan istimewa dan interaksi wajib pajak dengan fiskus terjalin baik dan meningkatkan pengawasan serta mencari tahu kebenaran hasil dari pajak terutang yang di sampaikan wajib pajak pada SPT-nya melalui pihak kedua atau ketiga, agar terhindar dari pajak fiktif atau kurang bayar dan memberikan sanksi yang tegas untuk keterlambatan atau tidak sama sekali menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa, baik itu karena kealpaan maupun kesengajaan.

Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung/sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010) dimana Jumlah SPT yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Lalu menurut penelitian Yudi, Sudahak dan Siti (2014), jumlah surat pemberitahuan masa yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin banyak jumlah surat pemberitahuan masa yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan pajak penghasilan badan akan meningkat.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan hasil analisis data mengenai Jumlah wajib pajak badan dan Penyampaian SPT masa PPh badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan pada KPP Pratama Sumedang, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Jumlah wajib pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Jumlah wajib pajak badan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 44,1%.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa penyampaian SPT masa PPh badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 13,4% pada KPP Pratama Sumedang.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Jumlah wajib pajak badan Dan Penyampaian SPT masa PPh badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

a) Bagi KPP Pratama Sumedang

1. Untuk meningkatkan agar penerimaan pajak penghasilan badan tercapai melalui jumlah wajib pajak badan disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang melalui bagian Ekstensifikasi harus selalu berusaha memberi sosialisasi tentang mengenai pentingnya dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak disaat masyarakat membangun usaha terutama dengan system e-registration. Serta memberikan strategi dan terobosan agar bisa melacak potensi pajak dengan menambah wajib pajak baru dan dilakukannya penyuluhan pembayaran pajak setiap bulan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar, agar menambah wajib pajak yang membayar pajak, sehingga penerimaan pajak pun meningkat dan bisa mencapai target yang telah ditentukan.
2. Untuk meningkatkan agar penerimaan pajak penghasilan badan tercapai melalui Penyampaian SPT masa PPh badan disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang melalui bagian waskon dan pihak petugas selalu memberikan pelayanan istimewa dan interaksi wajib pajak dengan fiskus terjalin baik dan meningkatkan pengawasan serta mencari tahu kebenaran hasil dari pajak terutang yang di sampaikan wajib pajak pada SPT-nya melalui pihak kedua atau ketiga, agar terhindar dari pajak fiktif atau kurang bayar dan memberikan sanksi yang tegas untuk keterlambatan atau tidak sama sekali menyampaikan surat pemberitahuan Masa baik itu karena kealpaan maupun kesengajaan. Banyaknya masyarakat yang memanipulasi serta tidak sepenuhnya mencantumkan dan menyampaikan segala harta dan kekayaan di dalam SPT masa tersebut maka berimbas terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang masih belum mencpai target atau optimal di KPP Pratama Sumedang.

b) Bagi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan agar penerimaan pajak penghasilan badan tercapai melalui jumlah wajib pajak badan dan penyampaian SPT masa PPh badan, wajib pajak harus aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama Sumedang mengenai cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan pengetahuan bagi wajib pajak dalam mematuhi segala kewajiban perpajakannya.

5.2.2 Saran Akademis

1. Pengembangan Ilmu
   Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat memberikan pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi Perpajakan dan untuk mendalami tentang jumlah wajib pajak Badan dan penyampaian SPT masa pajak penghasilan Badan yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Disarankan agar peneliti berikutnya dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa penerimaan pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak badan dan penyampaian SPT masa PPh badan. Selain itu peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode

yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

LAMPIRAN
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Jumlah WP Badan (Variabel X_1)	"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu" (Mardiasmo, 2010: 20)	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar disetiap periodenya (Undang-Undang No.28. Tahun. 2007)	Rasio
Penyampaian SPT Masa PPh Badan (Variabel X_2)	"Penyampaian surat pemberitahuan masa yaitu penyampaian surat pemberitahuan masa yaitu menyampaikan pelaporan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun atau masa pajak, dengan mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan mendatanganinya". (Soemarso S.R, 2007:52)	Jumlah SPT Masa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak (Soemarso S.R, 2007:52)	Rasio
Penerimaan PPh Badan (Variabel Y)	"Naik turunya penerimaan pajak sendiri dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajaknya" (Supramono dan Theresia, 2010:1)	Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (Supramono dan Theresia (2010:1)	Rasio

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jabbar Yoesoef. 2013. *Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak & Royalti*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo KOMPAS Gramedia.

Albert Kurniawan. 2010. *Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom.

Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI.* Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Asep. 2017. *Seksi Ekstensifikasi. KPP Pratama Sumedang*. Bandung.

Buddy Setianto. 2015. *Analisa Sektor Industri Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.

Damayanti Theresia Woro dan Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: ANDI.

Edi Slamet Irianto. 2015. *Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Ditjen Pajak*. Di Akses pada: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/06/09/403125/dalam-satu-dasawarsa-pembayaran-pajak-menurun.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7.* Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gunadi. 2012. *Pajak Internasional*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jupri Bandang. 2015. *Pajak Kepemimpinan Dan Masa Depan*. Penerbit: Dreamlight apps.

Mardiasmo. 2010. *Perpajakan, Edisi Revisi 2010*. Yogyakarta. Penerbit: Andi.

Margono, S. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Masyhuri dan Zainuddin,M. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.

Mohamad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat

Muhammad Said. 2015. *Pajak Kepemimpinan Dan Masa Depan*. Dreamlight apps, 2015.

Rahmad Husein. 2013. *Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.

Redi. 2017. *Seksi Pengawasan dan Konsultasi*. KPP Pratama Sumedang.

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill Building Aproach, New York-USA: John Wiley and Sons, Inc.*

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Penerbit raih asa sukses: Jakarta.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan teori dan kasus*. Salemba Empat: Jakarta.

Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif.* Salemba Empat: Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sujoko, Stevanus dan Yuliawati, 2008. *Metode Penelitian*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121*.

Tony Wijaya, 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta, Graha Ilmu.

Tresno, Indra, Wulan. 2011. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Badan di KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta : Disertasi Yang Tidak Dipublikasikan.*

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-undang No.16 tahun 2009. *Tentang KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009*.

Undang-Undang No.28.2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Usman & Akbar. 2011. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.